



Rencana Kerja Balitbangda Prov. Kaltim tahun 2022

 [balitbangdaprov.kaltim](https://www.instagram.com/balitbangdaprov.kaltim)

 Balitbangda Prov KT

 litbang.kaltimprov.go.id



KATA PENGANTAR

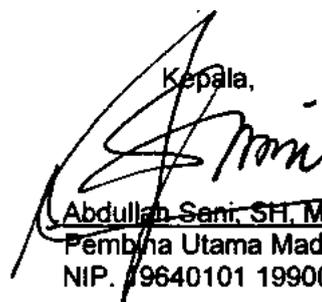
Semangat yang dibangun oleh seluruh elemen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada khususnya, serta karena atas berkat Rahmat dan Karunia Allah SWT, menjadi faktor kunci tersusunnya dokumen Rencana Kerja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 yang mana telah diselaraskan dengan perkembangan dinamika internal dan eksternal Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur serta kebijakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, diharapkan selanjutnya semakin memperkuat posisi dan revitalisasi institusi, serta meningkatkan eksistensi dan perannya bagi kemajuan Kalimantan Timur khususnya di bidang penelitian dan pengembangan.

Nantinya, Renja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 ini akan terus disempurnakan dan dimutakhirkan data yang disajikan dengan menyesuaikan perkembangan aktual yang terjadi baik skala nasional maupun provinsi.

Informasi yang disajikan dalam Renja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran perencanaan serta upaya pencapaian kinerja kelitbang dalam satu tahun.

Samarinda, 28 Juli 2021

Kepala,

Abdullah Sani, SH, M. Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19640101 199003 1028



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahun Lalu	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	37
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	40
2.4. Review Terhadap RKPD Tahun 2021.....	47
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	52
BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2022	53
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah Tahun 2022	53
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja	55
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2022	
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	56
BAB V Penutup	78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana pada pasal 11 (1) menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan ;
3. Penyusunan Rancangan
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir;
6. Penetapan.

Setelah persiapan penyusunan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur berada pada tahapan pembuatan Rencana Kerja Tahun 2022 dengan berpedoman pada : RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dan evaluasi hasil Renja Tahun 2020.



Rencana Kerja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 merupakan tahun keempat periode pembangunan jangka menengah (RPJMD) Tahun 2019-2023 di Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2019-2023.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

- 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 060/2700/Litbang, tanggal 1 September 2016 perihal Pedoman Arah Penataan Kelembagaan Litbang Di Lingkungan Pemda Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2005 - 2025;
 17. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;

- 
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
 21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Balitbangda Prov. Kaltim.
 22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 disusun dengan maksud menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan dan menyusun RKA Tahun 2022 yang mengacu pada Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Tahun 2022 tersebut adalah menghasilkan perencanaan penelitian yang matang untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kalimantan timur serta mendukung ibu kota negara yang ramah lingkungan dan terintegrasi, serta agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah dicanangkan dalam perjanjian kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

- 
- 1.2 Landasan Hukum.
 - 1.3 Maksud dan Tujuan.
 - 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2022

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (2019-2023)

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2020 dilaksanakan melalui DPA dan DPA-P Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2020 terdiri dari 8 (delapan) program terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
6. Program Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi
7. Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan
8. Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan

Secara umum program prioritas yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan telah dijalankan sesuai dengan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2019. Kemudian menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Evaluasi terhadap indikator kinerja program dan kegiatan tahun 2020, sebagaimana tabel 2.1.1 berikut :

Tabel 2.1.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Pencapaian Renstra Tahun 2019-2023 Balitbangda Prov. Kaltim
(Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2019-2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2019-2020)				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra			
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
Usuran Penunjang Pemerintahan Daerah														
4	07	01	07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlayannya administrasi perkantoran	Persen	100	100	80	80	100	Permen dagri 90/2019	100	100
			01	Kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran	Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran	Kegiatan	75	15	15	15	100	Permen dagri 90/2019	30	40
07	01	08		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	Unit Kerja	5	2	3	3	100	Permen dagri 90/2019	5	100
			02	Kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana	Jumlah kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana	Kegiatan	40	8	8	8	100	Permen dagri 90/2019	16	40
07	01	09		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Persentase ASN yang memiliki	Persen	85	80	81	81	100	Permen dagri	80	94

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2019-2020)				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra			
											6	7	8=7/6
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
	Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah												
	Pemerintah Daerah	standar kompetensi						90/2019					
	01	Kegiatan koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	Jumlah ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	Orang	747	212	340	437	97	Permen dagri 90/2019	649	87	
	02	Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan peningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Orang	60	1	10	1	10	Permen dagri 90/2019	2	3	
07	01	10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai akuntabilitas kinerja PD	BB/A	81	59	78	56	82	Permen dagri 90/2019	59	73
		01	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	Dokumen	50	10	10	10	100	Permen dagri 90/2019	20	40
			Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	Jumlah laporan evaluasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Laporan	115	23	23	23	100	Permen dagri 90/2019	46	40
07	01	23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase teknologi yang dapat dimanfaatkan dengan	Persen	80	80	80	80	100	Permen dagri 90/2019	80	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2019-2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2019-2020)			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra		
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
	Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah												
			optimal						9				
	02	Kegiatan Pengembangan Teknologi Informasi Kelitbangan	Persentase terselenggaranya program pemanfaatan teknologi informasi kelitbangan	Persen	80	80	80	80	80	Permen dagri 90/2019	80	100	
			Jumlah artikel jurnal riset pembangunan dan buletin lembusuaana	laporan	350	70	70	10	100	Permen dagri 90/2019	80	23	
		Kegiatan Rakorda Kelitbangan	Persentase terselenggaranya kegiatan Rakorda Kelitbangan	Persen	100	100	100	100	100	Permen dagri 90/2019	100	100	
07	01	48	Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang sosial dan pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	Permen dagri 90/2019	100	100
			Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah Laporan Litbang Sub Bidang Sosial dan Budaya Yang Dilaksanakan	Laporan	5	1	1	1	100	Permen dagri 90/2019	2	40

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2019-2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2019-2020)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1				2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah										
				Jumlah Laporan Litbang Sub Bidang Kependudukan , Pembedayaan Yang Dilaksanakan	Laporan	5	1	1	1	100	Permen dagri 90/2019	2	40	
				Jumlah Laporan Litbang Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintah & Pengkajian Peraturan Yang Dilaksanakan	Laporan	5	1	1	1	100	Permen dagri 90/2019	2	40	
				Kegiatan penelltian mandiri bidang social dan pemerintahan	Laporan	35	7	7	0	100	Permen dagri 90/2019	14	40	
07	01	41		Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persen	100	100	70	70	100	Permen dagri 90/2019	85	85	
			01	Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Laporan	5	1	1	1	100	Permen dagri 90/2019	2	40	
				Jumlah Laporan Litbang Sub Bidang Sumber Daya Alam dan	Laporan	5	1	1	1	100	Permen dagri 90/2019	2	40	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2019-2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2019-2020)				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
	Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah												
		Lingkungan Hidup yang dilaksanakan						9					
		Jumlah laporan Litbang Sub Bidang pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana yang dilaksanakan	Laporan	5	1	1	1	100	Permen dagri 90/2019	2	40		
		Kegiatan penelitian mandiri bidang ekonomi dan pembangunan	Laporan	30	5	5	0	100	Permen dagri 90/2019	5	17		
07	01	47	Program Litbang Bidang Inovasi & Teknologi	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang inovasi dan teknologi	Persen	100	100	70	70	100	Permen dagri 90/2019	85	85
		01	Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan litbang sub bidang Inovasi dan pengembangan teknologi yang dilaksanakan	Laporan	5	1	1	1	100	Permen dagri 90/2019	2	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2019-2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2019-2020)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah										
		Jumlah laporan litbang sub bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi yang dilaksanakan	Laporan	5	1	1	1	100	Permen dagri 90/2019	2	40
		Jumlah laporan litbang sub bidang diseminasi kelitbangan yang dilaksanakan	Laporan	5	1	1	1	100	Permen dagri 90/2019	2	40
		Kegiatan penelitian mandiri bidang inovasi dan teknologi	Laporan	17	4	1	1	100	Permen dagri 90/2019	5	29.4

Catatan :

1. Program dan kegiatan pada matrik tersebut berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang telah dilaksanakan mulai tahun 2019-2020,
2. Tingkat realisasi capaian kinerja Renstra beberapa kegiatan berada di bawah 87%, disebabkan oleh perubahan nomenclature, sehingga target Renstra hanya dihitung dari tahun 2019-2020.

Tabel 2.1.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Pencapaian Renstra Tahun 2019-2023 Balitbangda Prov. Kaltim
(Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021-2023)	
									Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1				2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	07	01	07	Urusan Penunjang pemerintahan daerah			100%	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100%	90%	90%
			01	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah			100%	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100%	90%	90%
07	01	08		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase	100	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100%	90%	90%
			02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	3	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1 laporan	1 laporan	33%
07	01	09		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang	Laporan	3	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1 laporan	1 laporan	33%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021-2023)		
								Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
					Pemerintahan Umum									
			01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan	3	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1 laporan	1 laporan	33%
			02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	6	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	2 laporan	2 laporan	33%
07	01	10		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	3	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1 laporan	1 laporan	33%
			01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase	3	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006			
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan	Persentase	3	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006			

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021-2023)	
1	2	3					4	5	6		7	8=7/6
07	01	23	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan	3	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	1 laporan	33%
		02	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Laporan	3	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006		
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Laporan	3	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006		
			Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Laporan	3	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006		
07	01	48	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Laporan	3	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	1 laporan	33%
			Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Laporan	3	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021 (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021-2023)		
1	2	3	4					5	6	7		8=7/6	9	10=(5+7+9)
				Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Laporan	3	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1 laporan	1 laporan	33%
				Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Laporan	3	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006			
				Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Laporan	3	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006			
07	01	41		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Laporan	3	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1 laporan	1 laporan	33%
			01	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Laporan	3	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1 laporan		
				Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	6	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	2 laporan		
				Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Laporan	3	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1 laporan		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021 (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021-2023)	
									Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1				2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Laporan	3	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1 laporan		
07	01	47		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase	100	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100%	90%	90%
			01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Laporan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Inovasi dan Teknologi	Laporan	3	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1 laporan	1 laporan	33%
				Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah rancang bangun yang diuji cobakan	Rancang bangun	3	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1 RB	1 RB	33%
				Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Inovasi Daerah yang di terapkan di Pemprov. Kaltim	Inovasi	62	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	12 inovasi	12 inovasi	19%
				Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Rakor Kelitbangan	Laporan	3	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1 laporan	1 laporan	33%
					Jumlah hasil kelitbangan yang di Diseminasikan	Diseminasi	75	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	25 diseminasi	10 diseminasi	13%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021-2023)		
						Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
			Jumlah artikel jurnal yang diterbitkan	artikel	40	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	20 artikel	10	25%
			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	HKI	51	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1 HKI	1 HKI	2%
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase	100	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100%	90%	90%
			Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Laporan	3	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1 laporan	1 laporan	33%
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Persentase	100	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100%		
			Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Laporan	3	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1 laporan		
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Laporan	3	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1 laporan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021 (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021-2023)	
						Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Laporan	3	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	1 laporan		
	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Laporan	3	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	1 laporan		
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase	100	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	100%	90%	90%
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Laporan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Inovasi dan Teknologi	Laporan	3	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	1 laporan	1 laporan	33%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerrintahan Daerah	Persentase	100	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	100%	95%	95%
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan hasil evaluasi konerja perangkat daerah yang direalisasikan tepat waktu	Dokumen	93	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	31 dokumen	31 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan	Laporan	63	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	21 dokumen	21 dokumen	33%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	30	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	10 Dokumen	10 Dokumen	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021-2023)	
						Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen	42	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	14 Dokumen	14 Dokumen	33%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	Dokumen	42	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	14 dokumen	14 dokumen	33%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen	30	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	10 dokumen	10 dokumen	33%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Pegawai	37	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	10 pegawai	10 pegawai	33%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana	Bulan	36	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	12 bulan	12 bulan	33%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	Buah	71.500	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	23.500 buah	2300	3%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	Jenis	44	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	12 jenis	12 jenis	33%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Unit	29	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	8 unit	8 unit	27%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	Jenis	81	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	Permen dagri 13 th 2006	27 Jenis	27 jenis	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021 (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021-2023)	
						Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai yang melakukan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Pegawai	1.303	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	358	429 pegawai	33%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	Unit	168	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	56 unit	56 unit	33%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Unit	11	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	3 unit	3 unit	27%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	Unit	58	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	16 unit	16 unit	27%
	Pengadaan Mebel	jumlah mebelair yang diadakan	Unit	169	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	37 unit	37 unit	22%
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	Bulan	36	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	12 bulan	12 bulan	33%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang dilaksanakan	Surat	364	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100 surat	95 surat	26%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan daftar gaji non ASN	Laporan	39	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	13 laporan	13 laporan	33%
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	laporan	36	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	12 laporan	12 laporan	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021-2023)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah	Kegiatan	15	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	5 kegiatan	5 kegiatan	33%
	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara	Unit	1	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1 unit	1 unit	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	82	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	25 unit	25 unit	30%
	pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	Unit	2	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	2 unit	2 unit	100%
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	unit	189	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	52 unit	52 unit	27%
	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	unit	1	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1 unit	1 unit	100%

Catatan :

1. Program, kegiatan, sub kegiatan periode Renstra Tahun 2021-2023 pada tabel di atas telah disesuaikan dengan Permendagri nomor 90 Tahun 2019.
2. Capaian kinerja pada kolom 9 dan 10 adalah perkiraan sampai dengan triwulan ke IV.
3. Pada triwulan ke III tahun 2021 sempat terjadi refocusing anggaran sebagai dampak pandemic covid-19, namun pada bulan Nopember 2021 anggaran dikembalikan kembali ke Perangkat Daerah,
4. Meskipun demikian sampai dengan akhir tahun 2021 diperkirakan realisasi capaian kinerja keuangan ataupun fisik diperkirakan mencapai angka lebih dari 90%.



Capaian target kinerja dan penyerapan anggaran program/kegiatan Renja Balitbangda Prov. Kaltim Triwulan IV (Oktober-Desember) merupakan anggaran DPA Perubahan Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2020, terdiri dari 8 (delapan)) program dan 14 (empat belas) kegiatan. Adapun penjelasan atau uraian capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada triwulan IV realisasi keuangannya Rp. 440.351.387,-, sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp. 1.268.803.028,-. Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari 14 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Honorarium pengelola keuangan.
- b) Belanja ATK
- c) Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya.
- d) Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran.
- e) Belanja telepon.
- f) Belanja air
- g) Belanja listrik
- h) Belanja surat kabar/majalah.
- i) Belanja kawat/faxsimili/internet/TV kabel/TV satelit.
- j) Belanja paket/pengiriman.
- k) Belanja jasa publikasi
- l) Belanja jasa tenaga teknis/non teknis.
- m) Belanja cetak
- n) Belanja penggandaan

Capaian kinerja kegiatan berupa jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran sampai dengan triwulan IV telah terealisasi sebanyak 14 (empat belas) kegiatan atau 100%. Capaian indikator kinerja program dengan tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM), pada triwulan IV terealisasi sebesar 25%.

Realisasi capaian kinerja keseluruhan dari triwulan I - IV tercapai 85%, sehingga pengukuran tingkat capaian kinerja program tercapai 100%. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SPM) pada tahun 2020 belum dapat dilaksanakan, sehingga perhitungan tersebut diperoleh dari tingkat kepuasan sub satker pada Balitbangda Prov. Kaltim terhadap pelayanan sekretariat terkait kegiatan pelayanan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada triwulan IV realisasi keuangannya sebesar Rp. 561.204.875, sedangkan sampai dengan triwulan IV Rp. 799.236.203,- dengan realisasi capaian kinerja kegiatan tercapai 100% atau 13 kegiatan. Adapun rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Honorarium tim pengadaan barang dan jasa.
- b) Belanja alat listrik dan elektronik.
- c) Belanja jasa pemeliharaan alat kantor dan gedung.
- d) Belanja pemeliharaan kantor dan taman.
- e) Belanja penggantian suku cadang.
- f) Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas.
- g) Belanja pajak kendaraan bermotor
- h) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan.
- i) Belanja pengadaan mesin penghancur kertas.
- j) Belanja pengadaan printer.
- k) Belanja pengadaan computer (hardisk eksternal).
- l) Belanja pengadaan kamera.
- m) Belanja pengadaan proyektor.

Realisasi kinerja program (unit kerja PD atau sub satker yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu) dengan target sub satker yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu, terpenuhi oleh 3 unit sub satker yakni : bidang sosial dan pemerintahan, bidang ekonomi dan pembangunan, bidang inovasi dan teknologi). Penilaian berdasarkan ketepatan dalam penyampaian SPJ kegiatan.

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah pada triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 1.096.301.692,-. Realisasi capaian kinerja program dengan uraian persentase ASN yang memiliki standar kompetensi tidak dapat tercapai karena pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur berupa bimte/diklat/pelatihan tidak dapat dilaksanakan karena pandemic covid-19.

Program terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

- a) Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah.

Kegiatan dengan indikator kinerja jumlah ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi pada triwulan IV terealisasi sebanyak 323 orang, dengan



realisasi keuangan sebesar Rp. 951.981.692,-. Sampai dengan triwulan IV terealisasi sebanyak 437 orang sebesar Rp. 1.273.594.943,-.

Bahwa koordinasi dan konsultasi yang telah dilaksanakan terkait dengan kelitbangan, pengambilan data penelitian dan menghadiri undangan yang bersifat penting.

b) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran covid-19, sehingga tahun 2020 tidak ada kursus-kursus singkat/pelatihan, untuk ASN/fungsional peneliti yang akan mengikuti diklat atau bimtek.

4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan uraian indikator kinerja program yakni nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah, akan dinilai pada triwulan I tahun 2021 oleh Inspektorat Prov. Kaltim dengan target nilai 79.00 (BB), sehingga pada triwulan IV Tahun 2020 belum dapat diperoleh nilai SAKIP tersebut.

Program terdiri dari 2 kegiatan yakni :

a) Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran. Target capaian kinerja kegiatan adalah 10 dokumen perencanaan dan anggaran, yang terdiri dari :

- 1) DPA Tahun 2020
- 2) RKA Tahun 2020,
- 3) DPA-P Tahun 2020
- 4) RKA-P Tahun 2020,
- 5) Renja Tahun 2021
- 6) Rancangan Renja Tahun 2021
- 7) Rancangan Akhir Renja Tahun 2021
- 8) Renja Tahun 2021
- 9) Perubahan Renja Tahun 2020
- 10) Draft Revisi Renstra Tahun 2019-2023.

Pada triwulan IV realisasi keuangannya sebesar Rp. 10.928.400,-, dengan capaian kinerja fisik sebanyak lima dokumen perencanaan dan anggaran. Sampai dengan triwulan IV telah tersusun 10 dokumen perencanaan dan anggaran atau tercapai 100%.

b) Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah pada triwulan IV realisasi keuangan sebesar Rp. 2.800.000,-. Sampai dengan triwulan IV realisasi keuangan tercapai Rp. 4.300.000,-



sebanyak 23 dokumen. Adapun indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari 23 (dua puluh tiga) laporan yakni :

1. LKjIP Tahun 2019 (PK, IKU dan Kertas Kerja Ess II, III dan IV, RKT Tahun 2020)
2. LPPD Tahun 2019.
3. Tepra (Januari-Desember) Tahun 2020/ 12 dokumen.
4. Laporan Evaluasi dan Pengendalian Renja Tahun 2020 (triwulan I s.d IV)/4 dokumen.
5. Radalok (triwulan)
6. Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Tahun 2020.

5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki indikator kinerja program yaitu persentase teknologi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal dengan target 80%. Sampai dengan triwulan IV realisasi keuangan Rp. 206.157.500,-, dengan tingkatan capaian kinerja 100%. Program terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

a) Kegiatan Pengembangan Teknologi Informasi Kelitbangan.

Kegiatan mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase terselenggaranya program pemanfaatan teknologi informasi kelitbangan, berupa kegiatan website dengan target 80%. Perhitungan target 80% diperoleh dari terselenggaranya kegiatan webhosting dan pengelolaan website. Sampai dengan triwulan IV tingkat capaian kinerjanya 100%.
2. Jumlah Artikel Jurnal Riset Pembangunan. Pada Tahun 2020 ini jurnal tersebut berlaku on line dan terbit 2 (dua) kali dalam setahun (Juni dan Desember). Setiap jurnal berisikan 5 (lima) artikel atau karya tulis ilmiah yang telah lulus verifikasi oleh tim penilai atau asesor Jurnal Riset Pembangunan Balitbangda Prov. Sampai dengan triwulan IV terbit 10 (sepuluh) artikel.

b) Kegiatan Rakorda Kelitbangan dengan indikator kinerja persentase terselenggaranya kegiatan Rakorda Kelitbangan terealisasi 100% pada triwulan IV yang dilaksanakan padabulan Nopember. Realisasi kegiatan berupa pelaksanaan Rakorda Kelitbangan dan laporan akhir.



6. Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan

Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan sampai dengan triwulan IV realisasi keuangannya sebesar Rp. 311.377.200,-. Sampai dengan triwulan IV, capaian indikator kinerja program persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang sosial dan pemerintahan tercapai 100%.

Program terbagi dalam dua kegiatan yakni :

a) Kegiatan Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan, terdiri dari 3 (tiga) sub bidang :

- Sub Bidang Sosial Budaya dengan judul “Pemberian Penghargaan Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Kab/Kota Se-Provinsi Kaltim”. Sampai dengan triwulan IV kegiatan telah tercapai 100%, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :
 1. Diperolehnya kriteria penilaian dari parapihak.
 2. Terverifikasi dan tervalidasinya kriteria penilaian.
 3. Diperolehnya hasil penilaian panji-panji keberhasiltan tahun 2020.
 4. Terverifikasi dan tervalidasinya hasil penilaian.
 5. Terbitnya SK Gubernur tentang penetapan pemenang.
 6. Penyerahan pemenang dilaksanakan pada triwulan I Tahun 2021.

- Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan judul “Penilaian Perangkat Daerah Terbaik di Lingkungan Pemprov. Kaltim Tahun 2019”. Sampai dengan triwulan IV kegiatan telah tercapai 100%, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :
 1. Diperolehnya daftar pemenang penghargaan Perangkat Daerah Terbaik.
 2. Penyerahan Penghargaan dilaksanakan di kantor Balitbangda Prov. Kaltim, secara luring terbatas dan daring, bersamaan dengan Rakorda Kelitbangan dan penandatanganan MoU Kelitbanggan tiga Perguruan Tinggi di Samarinda.
 3. Laporan akhir kegiatan.

- Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan dengan judul kegiatan “Optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal pada perusahaan sektor swasta, BUMN, dan BUMD di Kalimantan Timur”.



Sampai dengan triwulan IV kegiatan telah tercapai 100%, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :

1. Seminar penelitian secara luring terbatas dan daring.
2. Laporan akhir kegiatan.
3. Rekomendasi terhadap **Kebijakan Pemerintah Daerah**

Sebagai bentuk upaya untuk memberikan perlindungan hukum khususnya hak untuk bekerja bagi tenaga kerja lokal Kalimantan Timur perlu segera membuat regulasi serta peraturan-peraturan mengenai sistem pemberian kesempatan yang lebih luas kepada tenaga kerja lokal Kalimantan Timur untuk mengakses pemberi kerja di Kalimantan Timur agar mereka memperoleh kesempatan sebaikbaiknya untuk memperoleh pekerjaan di Kalimantan Timur sebagai warga di Provinsi ini.

b) Kegiatan Penelitian Mandiri Bidang Sosial dan Pemerintahan.

Sampai dengan triwulan IV kegiatan telah tercapai 100%, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :

1. Seminar penelitian secara luring terbatas dan daring.
2. Laporan akhir kegiatan.
 - Kegiatan Kajian Hubungan Pemerintahan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan dalam Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.

Rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah :

- Pemerintah Kecamatan, hendaknya memberikan “ruang gerak” yang bebas kepada unsur perangkat kerja Kelurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kelurahan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan adanya pelimpahan kewenangan, maka Lurah nantinya akan dapat bergerak yang lebih luas untuk melakukan tugas dan fungsinya, termasuk inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, bukan sebaliknya menjadi penghambat bagi Kelurahan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Perlu ketegasan peran Pemerintah Kecamatan dalam hubungan dengan Pemerintah Desa dikarenakan ada posisi kemandirian desa dalam Undang Undang Desa.



Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai tahan evaluasi.

- Kajian Kinerja Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Kaltim.

Rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah : Diperlukan intervensi pemerintah untuk membantu pemasaran dalam menampung hasil kreasi dari kelompok usaha perempuan, dapat melalui platform digital (aplikasi jual beli) maupun pasar kreatif yang rutin diadakan

- Kegiatan Kajian Penegakan Hukum Lingkungan dalam Pembangunan Daerah di Kaltim.

Rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah : Perlunya penguatan pengawasan pelaksanaan kebijakan dalam proses pembangunan yang berwawasan lingkungan menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung lingkungan

- Kegiatan Kajian Pemetaan Sumber Daya Aparatur Desa di Kaltim/Lanjutan.

Rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah : perlunya peningkatan jumlah dan kualitas aparatur desa di wilayah perdesaan Kalimantan Timur. Peningkatan kualitas tidak hanya aspek teknis administrasi, namun manajerial dan kewirausahaan, meliputi: bidang perencanaan penganggaran, keuangan desa, kebijakan desa, dan manajemen pelayanan desa. Peningkatan kapasitas ini tentu melalui bimbingan teknis, pendampingan, serta terprogramnya kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang berkesinambungan tentang lima aspek yang perlu ditingkatkan kapasitasnya tersebut.

- Kegiatan Kajian Dana Desa, Urbanisasi, dan Kemandirian Desa/Lanjutan.

Rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah : Urbanisasi di Kalimantan Timur dalam satu sisi menunjukkan keberhasilan pembangunan. Urbanisasi yang tidak terkendali pada sisi lain memberikan dampak negatif pembangunan. Kalimantan Timur dapat meningkatkan kesejahteraan di wilayah Perdesaan dan perkotaan melalui urbanisasi yang terkendali melalui pembangunan wilayah perkotaan dan Perdesaan secara terpadu. Pembangunan wilayah



perkotaan dan Perdesaan dapat dimulai dari wilayah utama yang menjadi prioritas terlebih dahulu.

- Kegiatan Studi Perkembangan dan Penanganan Teroris di Kaltim.
Rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah : Hendaknya pemerintah memberikan perhatian yang intens terhadap permasalahan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat, seperti masalah ekonomi, pendidikan, kesenjangan sosial, sehingga benih-benih radikalismeterorisme yang mengatasnamakan agama dapat diminimalisasi pertumbuhannya

7. Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan sampai dengan triwulan IV realisasi keuangannya sebesar Rp. 446.535.500,-. Sampai dengan triwulan IV, capaian indikator kinerja program persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang ekonomi dan pembangunan tercapai 100%.

Alokasi dana tersebut terbagi dalam 2 (dua) kegiatan sub bidang yakni :

a) Kegiatan Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari 3 (tiga) sub bidang yakni :

- Sub Bidang Ekonomi dengan judul kegiatan :

- 1) Kajian Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Kabupaten Paser, sampai dengan triwulan IV kegiatan telah tercapai 100%, dengan realisasi kegiatan laporan akhir. Rekomendasi terhadap **Kebijakan Pemerintah Daerah** adanya peran pemerintah daerah dalam hal pendanaan terutama yang terkait dengan peningkatan potensi desa.
- 2) Kajian Antisipasi Pelemahan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Dampak Dari Resesi Ekonomi Global Dalam Kondisi Pandemi Covid-19. Rekomendasi terhadap **Kebijakan Pemerintah Daerah**
 - Dalam upaya Perbaikan Ekonomi khususnya Iklim Investasi, Industri Manufaktur dan Pariwisata, pemerintah dapat membentuk tim *Task Force* Percepatan Pemulihan Ekonomi di Kalimantan Timur, yang bertugas mempersiapkan Rencana Investasi yang siap di jual ke Investor. Mulai dari Hulu – tengah



hingga – Hilir. Tugas tim *Task Force* akan disusun berdasarkan Keputusan Gubernur.

- Mengantisipasi perubahan rantai pasokan barang ke daerah Kaltim, pemerintah melalui SKPD untuk memastikan protokol logistik yang menjamin kemudahan aliran barang antar daerah. Kemudian, dalam jangka menengah hingga panjang, diperlukan kebijakan yang lebih strategis dan mendasar, khususnya menjaga pasokan Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan makanan utama berupa Beras.
 - Untuk mengatasi Pengangguran, Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi dimaksudkan agar pelaku usaha tetap terus melanjutkan kegiatan usaha sehingga dapat menghindari adanya PHK terhadap para pekerjanya,
 - Pemerintah Provinsi dapat menyediakan program untuk pekerja sektor formal.
 - Pemerintah Provinsi Kaltim dapat membuat program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya tunai, padat karya produktif, penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG), Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dan kewirausahaan, yang dimaksudkan untuk penyerapan tenaga.
- Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan Usaha Peningkatan Produksi Pangan Pada Lahan Potensial dan Pemanfaatan Lahan Kritis Di Provinsi Kalimantan Timur, sampai dengan triwulan IV kegiatan telah tercapai 100%, dengan realisasi kegiatan laporan akhir. Rekomendasi terhadap **Kebijakan Pemerintah Daerah** : Pemerintah Daerah harus konsisten dalam penggunaan lahan di daerah karena telah didukung dengan adanya pengendalian konversi lahan dengan diterbitkannya Undang-undang No. 41/2009 tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
3. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana sampai dengan triwulan IV kegiatan telah tercapai 100%, dengan realisasi kegiatan :
1. Laporan akhir
 2. Dengan judul kegiatan :

4. Kajian Strategi Pengembangan Infrastruktur di Kawasan Sentra Produksi Perikanan Kota Bontang.

Rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah : Penambahan kuota BBM bersubsidi untuk mendukung kepastian usaha perikanan tangkap nelayan. Perjanjian Kerja Sama Andon antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah untuk mengakomodir nelayan Andon mendapatkan SIPI (Surat Izin Penangkapan Andon) Andon dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

5. Kajian Analisis Potensi Penerimaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dimasa Transisi Ibu Kota Negara (IKN 2020 – 2024).

Rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah :

- Membentuk *Task-Force* pembentukan BUMD Kaltim Niaga Enterprises (PT.KALNES) dengan membuat Surat Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim *Task-Force* pembentukan BUMD.
- Segera Menyusun Dokumen Perencanaan Pengembangan Bisnis PT KALNES,
- Mempersiapkan Kelembagaan BUMD Kaltim Niaga Enterprises,
- Menugaskan *Task-Force* untuk menyusun *Profile Company* BUMD Kaltim Niaga Enterprises, sebagai bahan Pejualan Saham kepada Investor dan Rekan Kerja.

6. Kegiatan penelitian mandiri bidang ekonomi dan pembangunan. Sampai dengan triwulan IV kegiatan telah tercapai 100%, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :

1. Laporan akhir kegiatan.

2. Adapun judul kegiatan :

1) Identifikasi Kemacetan Arus Lalu Lintas Di Kota Samarinda.

Rekomendasi terhadap pemerintah : membuat Ruang Henti Khusus kendaraan (RHK) sepeda motor di simpang bersinyal yang masing-masing kaki simpang di ruas jalan yang sering mengalami kemacetan

2) Analisa Nilai Tambah Produk Pertanian Di Kalimantan Timur.

Rekomendasi : Dukungan produk dari hulu sampai ke hilir sangat diperlukan perencanaan yang baik agar bahan baku tersedia secara



konsisten. Nilai tambah produk pertanian tersebut dapat meningkatkan pendapatan baik petani maupun pelaku usaha yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.

3) Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur.

- Berdasarkan perhitungan Rasio Aktivitas, Pada Tahun Anggaran 2015-2019, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Aparatur dibandingkan dengan kegiatan Belanja Publik. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur seharusnya lebih cenderung menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Publik yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat yang meliputi tiga bidang, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari dana yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- Berdasarkan perhitungan Rasio Belanja Tidak Langsung dan Rasio Belanja Langsung, Pada Tahun Anggaran 2015-2019, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Tidak Langsung dibandingkan dengan kegiatan Belanja Langsung. Semestinya Belanja Langsung lebih besar dari Belanja Tidak Langsung, karena belanja langsung sangat memengaruhi kualitas output kegiatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur seharusnya dapat meningkatkan Belanja Langsung agar kualitas outputnya meningkat, dan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi dapat berjalan dengan baik.

4) Analisis Peramalan Jumlah Permintaan Darah di Samarinda.

Rekomendasi : Dalam rangka pemenuhan kebutuhan darah di Kota Samarinda dan pemenuhan standarisasi tentang cara pembuatan obat yang baik (CPOB) dukungan dari Pemerintah daerah berupa anggaran, sarana dan prasarana seperti peralatan, pembinaan, bimbingan serta dukungan dari masyarakat Kota Samarinda beserta *stakeholder* terkait sangat diperlukan.

8. Program Litbang Bidang Inovasi & Teknologi

Program Litbang Bidang Inovasi & Teknologi sampai dengan triwulan IV realisasi keuangannya sebesar Rp. 417.223.900,-. Sampai dengan triwulan IV, capaian indikator kinerja program persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang inovasi dan teknologi tercapai 100%.

.Program terdiri dari 2 (dua) kegiatan yakni :

a) Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi, terdiri dari 3 (tiga) sub bidang yakni :

7. Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi, dengan judul kegiatan. : Sampai dengan triwulan IV kegiatan telah tercapai 100%, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi dan Pengumpulan Data Inovasi dan Pengembangan Teknologi/Gelar Inovasi Teknologi)". Sampai dengan triwulan IV kegiatan telah tercapai 100%, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :

➤ Laporan Akhir.

➤ Rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah : Perlu adanya penghargaan kepada instansi, Perangkat Daerah, masyarakat maupun dunia usaha yang telah melakukan inovasi dan pengembangan teknologi agar semakin memotivasi mereka dalam melakukan inovasi dan pengembangan teknologi, disamping itu juga perlu adanya dorongan dan dukungan dalam bentuk anggaran untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dari inovator serta perlu adanya pendampingan teknis untuk meningkatkan pengembangan teknologi yang dilakukan oleh masyarakat maupun pelaku usaha.

- *Focus Group Discussion (Fgd) Tindak Lanjut Hasil Kegiatan Pra Feasibility Study (Pra-Fs) The Buluminung Nuclear Industry Science Techno Park (BNI-STP)*. Sampai dengan triwulan IV telah tercapai 100%, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :

➤ Laporan Akhir.

➤ Rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah : segera lakukan komunikasi dan koordinasi intensif antara pemerintah Provinsi Kaltim dalam hal ini adalah Balitbangda Provinsi Kaltim dengan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam hal ini



Bappelitbang Kabupaten PPU. Hal yang serupa juga segera dilakukan dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) oleh Balitbangda Prov. Kaltim dan Bappelitbang Kab. PPU.

8. Sub Bidang Difusi dan Penerapan Teknologi dengan judul – judul kegiatan :

- Fasilitasi Kegiatan Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi/Konsolidasi, Koordinasi, Inovasi dan Teknologi Pada Lembaga/Kementerian Terkait. Sampai dengan triwulan IV telah tercapai 100%, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :

- Laporan akhir
- Rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah : perlu adanya kegiatan monitoring dan evaluasi pemerintah provinsi melalui Balitbangda Prov.Kaltim kepada lembaga litbang di daerah yaitu kabupaten dan kota di kaltim, guna mengintensifkan pengembangan informasi data dan inovasi teknologi dalam memotivasi kreativitas inovatif untuk pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

- Penjaringan Peserta Inovasi Dan Kreativitas Pelayanan Perangkat Daerah (Pepes Ikan Peda) Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Kalimantan Timur. Sampai dengan triwulan IV telah tercapai 100%, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :

- Laporan akhir.
- Rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah : Setiap Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Kota, harus konsisten dalam melakukan inovasi. Sehingga inovasi tidak berhenti, tapi bisa terus berjalan baik itu berupa pengembangan maupun inovasi baru.

9. Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan dengan judul kegiatan diseminasi hasil kelitbangan, pada triwulan IV telah tercapai 100%, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :

- Laporan Akhir.
- Rekomendasi di bidang pemerintahan, pendidikan dan kebudayaan, ekonomi, infrastruktur, kesehatan, pertanian dan perkebunan, lingkungan hidup.

- 
- b) Penelitian mandiri bidang Inovasi dan Teknologi, sampai dengan triwulan IV realisasi keuangannya sebesar Rp. 41,312.400,- dengan judul kegiatan “ Strategi Pengembangan Inovasi Pengembangan Industri Perikanan di Kota Bontang”. Realisasi kegiatan :
- Laporan Akhir.
 - Rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas kelitbangan tersebut, telah didukung dengan kesepakatan dan kerjasama berupa MoU dan PKS yang dilaksanakan tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 seperti tampak pada tabel 2.1.2 berikut :

Tabel 2.1.3
Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kesepakatan dan Kerjasama
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

No.	PIHAK KERJASAMA	MASA BERLAKU	LINGKUP KERJASAMA	MONEV	MASALAH	TINDAK LANJUT
1.	MoU :					
	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia	1 (Satu) Tahun, 28 April 2016 sd 28 April 28 April 2017	Kerjasama lingkup Litbang teknologi pertanian spesifik lokal berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Tidak ada	PKS antara Balitbangda Prov. Kaltim dengan Balai Teknologi Pertanian Kaltim
	PKS :					
	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur	7 (Tujuh) Bulan, 2 Mei 2016 sd 2 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun data dan informasi kesesuaian beberapa jenis komoditas pertanian sesuai dengan kondisi agroekosistem wilayah. - Menyusun peta perwilayahan komoditas pertanian berdasarkan zona agrikologi skala 1 : 50.000 di Kab. PPU, Samarinda , Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur. - Mengidentifikasi komoditas unggulan di Provinsi Kalimantan 	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Tidak ada	Selesai : kerjasama ditindaklanjuti melalui kegiatan “Perwilayahan Komoditas Pertanian Unggulan Daerah Dalam Mendukung Pengembangan Pertanian Di Kalimantan Timur Tahun 2016”

No.	PIHAK KERJASAMA	MASA BERLAKU	LINGKUP KERJASAMA	MONEV	MASALAH	TINDAK LANJUT
			Timur.			
2.	MoU :					
	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	12 (dua belas) bulan, mulai 02 Nopember 2016-02 Nopember 2017	Kerjasama kelitbangan di : <ul style="list-style-type: none"> - Bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan - Bidang sosial ekonomi dan kependudukan - Bidang ekonomi dan pembangunan - Bidang inovasi dan teknologi 	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Tidak ada	PKS antara Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
	Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	12 (dua belas) bulan, mulai 02 Nopember 2016-02 Nopember 2017,	Kerjasama kelitbangan di : <ul style="list-style-type: none"> - Bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan - Bidang sosial ekonomi dan kependudukan - Bidang ekonomi dan pembangunan - Bidang inovasi dan teknologi 	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Tidak ada	PKS antara Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
	PKS :					



No.	PIHAK KERJASAMA	MASA BERLAKU	LINGKUP KERJASAMA	MONEV	MASALAH	TINDAK LANJUT
	Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara	5 (lima) Tahun, 2 Nopember 2016 sd 2 November 2021	Kerjasama kelitbangan di : <ul style="list-style-type: none"> - Bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan - Bidang sosial ekonomi dan kependudukan - Bidang ekonomi dan pembangunan - Bidang inovasi dan teknologi 	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Kebijakan rasionalisasi anggaran berdampak pada terhambatnya koordinasi dan konsolidasi kerjasama. dengan Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara	Bertukar data dan informasi kelitbangan dan mengaplikasikan hasil kelitbangan untuk kesejahteraan masyarakat dalam bentuk : <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi perubahan nomenclatur pada OPD Balitbangda di Provinsi Kalimantan Timur.
	Balitbangda Kabupaten Kutai Timur	5 (lima) Tahun, 2 Nopember 2016 sd 2 November 2021	Kerjasama kelitbangan di : <ul style="list-style-type: none"> - Bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan - Bidang sosial ekonomi dan kependudukan - Bidang ekonomi dan pembangunan - Bidang inovasi dan teknologi 	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Kebijakan rasionalisasi anggaran berdampak pada terhambatnya koordinasi dan konsolidasi kerjasama. dengan Balitbangda Kabupaten Kutai Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi hasil-hasil Ristek Aplikatif yang berbasis komoditas - Sosialisasi komoditas jelai sebagai salah satu potensi sumber pangan yang dapat dibudidayakan di Kalimantan Timur. - Sosialisasi komoditas kakao sebagai bahan baku pembuatan coklat dan permen guna meningkatkan

No.	PIHAK KERJASAMA	MASA BERLAKU	LINGKUP KERJASAMA	MONEV	MASALAH	TINDAK LANJUT
						kesejahteraan masyarakat khususnya petani kakao. - Untuk PKS antara Balitbangda Prov. Kaltim dengan Balitbangda Kab. Kutai Timur dalam proses menuju kerjasama tripartit.
3.	MoU :					
	Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi NTB, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Dan Provinsi Kalimantan Utara	5 (lima) tahun, mulai 15 Desember 2014-15 Desember 2019	Pengembangan potensi kawasan di sekitar yang dilalui ALKI-II di bidang : - Bidang Kelautan dan Perikanan, - Bidang Perhubungan, - Bidang Pariwisata, - Bidang SDM dan Iptek, - Bidang Perdagangan, - Bidang PU dan Infrastruktur - Bidang Lingkungan Hidup - Bidang lainnya yang dapat dikembangkan di kawasan ALKI-II	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Kebijakan rasionalisasi anggaran berdampak pada terhambatnya koordinasi dan konsolidasi antara pihak kerjasama	PKS antara Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Sulawesi Tengah
	PKS :					



No.	PIHAK KERJASAMA	MASA BERLAKU	LINGKUP KERJASAMA	MONEV	MASALAH	TINDAK LANJUT
	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	5 (lima) tahun , mulai 12 November 2016 sd 12 November 2021.	1. Kelitbangan dan inovasi pada 8 bidang : <ul style="list-style-type: none"> - Bidang Kelautan dan Perikanan, - Bidang Perhubungan, - Bidang Pariwisata, - Bidang SDM dan Iptek, - Bidang Perdagangan, - Bidang PU dan Infrastruktur - Bidang Lingkungan Hidup - Bidang lainnya yang dapat dikembangkan di kawasan ALKI-II 2. Kerjasama workshop/seminar dan kegiatan lainnya 3. Mengadakan pertemuan secara berkala dan berkelanjutan	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Kebijakan rasionalisasi anggaran berdampak pada terhambatnya koordinasi dan konsolidasi kerjasama.	Sedang berjalan
4.	Fakultas Pertanian Universitas Mataram	3 (tiga) tahun mulai 24 Juli 2014 – 24 Juli 2017	Bidang penelitian dan pengembangan ketahanan pangan, tanaman penghasil gaharu dan teknologi produksi gubal gaharu	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Kebijakan rasionalisasi anggaran berdampak pada terhambatnya koordinasi dan konsolidasi kerjasama.	Kegiatan terlaksana dalam bentuk kegiatan pengembangan gaharu di Kalimantan Timur, namun rasionalisasi

No.	PIHAK KERJASAMA	MASA BERLAKU	LINGKUP KERJASAMA	MONEV	MASALAH	TINDAK LANJUT
						anggaran PKS tidak dapat dilanjutkan.
5.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum	3 Tahun (2 Juni 2014 sd 2 Juni 2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan bidang infrastruktur jalan dan jembatan melalui pelatihan sumber daya manusia dan bentuk <i>in-house training</i> atau <i>on job training</i>. - Penelitian Bersama (<i>Joint Research</i>) - Tukar menukar informasi hasil litbang dan standarisasi konstruksi - Advis Teknik teknologi jalan dan jembatan - Joint workshop/seminar/sarasehan dan kegiatan relevan lainnya di bidang jalan dan jembatan 	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Jangka waktu MoU dengan Kementerian PU sudah berakhir pada tahun 2014, maka berdampak terhadap pelaksanaan PKS selanjutnya.	Sedang dalam proses perpanjangan MoU sehingga PKS dapat dilanjutkan kembali
6.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKS)	3 (Tiga) Tahun (24 Maret 2015 sd 24 Maret 2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan sumber daya air melalui pelatihan sumber daya manusia (SDM) dalam bentuk in 	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)		



No.	PIHAK KERJASAMA	MASA BERLAKU	LINGKUP KERJASAMA	MONEV	MASALAH	TINDAK LANJUT
			house training dan on job the -training. - Penelitian Bersama (Joint Research) bidang sumber daya air. - Advis teknis dalam bidang sumber daya air. - Pelatihan dan praktek kerja penggunaan alat laboratorium bidang sumber daya air. - Joint workshop/seminar/sarasehan dan kegiatan lainnya di bidang sumber daya air - Sharing data terkait bidang sumber daya air			
7.	Universitas Brawijaya Malang	1 (Satu) Tahun (21 Juni 2016 sd 21 Juni 2017)	Bidang pendidikan, penelitian, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan sosial budaya dan kepariwisataan	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Kebijakan rasionalisasi anggaran berdampak pada terhambatnya koordinasi dan konsolidasi kerjasama.	Terkait rasionalisasi anggaran, kegiatan hanya dilanjutkan dengan menginisiasi perintah direktif Gubernur Kaltim mengenai persiapan relokasi binatang-binatang peliharaan PT. Gunung Bayan Kab. Kutai Barat ke Kaltim Zoo dengan

No.	PIHAK KERJASAMA	MASA BERLAKU	LINGKUP KERJASAMA	MONEV	MASALAH	TINDAK LANJUT
						bekerjasama dengan pihak Jatim Park.
8.	Kesepakatan Bersama					
	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Kalimantan Timur dengan Rektor Universitas Mulawarman Samarinda - Gubernur Kalimantan Timur dengan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda - Gubernur Kalimantan Timur dengan Rektor Universitas Widyagama Mahakam Samarinda 	30 Nopember 2020-30 Nopember 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian dan pengembangan di berbagai aspek pembangunan - Tukar menukar informasi ilmu pengetahuan dan teknologi - Pemagangan dan praktek kerja lapangan 	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Kebijakan refocusing anggaran berdampak pada terhambatnya koordinasi dan konsolidasi kerjasama.	Pelibatan tim universitas dalam Focus Group Discussion (FGD) dan penyusun Studi Kelayakan The Mountain of ISRAN
9.	Kesepakatan Bersama					
	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Kalimantan Timur dengan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda - Gubernur Kalimantan Timur dengan Direktur Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Widya Cipta Dharma Samarinda 	14 Juli 2020-31 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian dan pengembangan di berbagai aspek pembangunan daerah - Tukar menukar informasi dan data ilmu pengetahuan dan teknologi - Pemagangan dan praktek lapangan 	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Kebijakan refocusing anggaran berdampak pada terhambatnya koordinasi dan konsolidasi kerjasama	FGD, DED dan pembangunan fisik The Mountain of ISRAN



No.	PIHAK KERJASAMA	MASA BERLAKU	LINGKUP KERJASAMA	MONEV	MASALAH	TINDAK LANJUT
	- Gubernur Kalimantan Timur dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur					
10.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur	14 Juli 2020-31 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian dan pengembangan di bidang pertanian dan hortikultura - Tukar menukar informasi dan data ilmu pengetahuan dan teknologi - Pemagangan dan praktek lapangan 	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Kebijakan refocusing anggaran berdampak pada terhambatnya koordinasi dan konsolidasi kerjasama, serta pembangunan fisik The Mountain of ISRAN	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah adalah pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tabel 2.2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Balitbangda Prov. Kaltim

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH (%)					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CAPAIAN ANALISIS
				TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020 (%)	TAHUN 2021 (%)	TAHUN 2022(%)	TAHUN 2023 (%)	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase Hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat			Indikator lama	26%	19%	27%	27%	Indikator lama	26%	19%	27%	
	Persentase Hasil Penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dalam mendukung pembangunan IKN				9%	18%	36%	36%		9%	18%	36%	

Catatan : Indikator Kinerja Utama tahun 2019 berbeda dengan tahun 2020-2023, karena pergantian kepemimpinan Kepala Badan.



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Issue Strategis Balitbangda Provinsi Kaltim :

1. Penetapan Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Negara.
2. Peningkatan Kinerja Balitbangda Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya.
3. Pemanfaatan Optimal Hasil Penelitian untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Bahwa berdasarkan issue strategis tersebut maka permasalahan yang terkait dengan pelayanan litbang dan faktor-faktor yang mempengaruhi yang dapat diidentifikasi berdasarkan analisis gambaran pelayanan litbang secara internal dan eksternal dapat dijabarkan sebagaimana tabel 2.3.1 berikut :

Tabel 2.3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Balitbangda Prov. Kaltim

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal (kewenangan PD)	Eksternal (diluar kewenangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran Pelayanan PD.	1. Pelaksanaan Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, , Bidang Inovasi dan Teknologi.	1. Standar kebutuhan pelayanan yang dikembangkan secara mandiri sesuai tugas dan fungsi PD.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Kepala Daerah Sangat Kuat 2. Kedudukan Balitbangda Sangat Strategis 3. Komitmen Pimpinan Kuat 4. Kualitas SDM Peneliti 5. Belum Optimalnya Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Kegiatan Litbang 6. Belum adanya perda penelitian satu pintu 7. Terbatasnya prasarana dan sarana penunjang penelitian (lahan, laboratorium, database litbang). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pemindahan IKN ke Kaltim 2. Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 3. Tersedianya SDM Peneliti di Luar Balitbangda 4. Adanya asosiasi peneliti di kaltim 5. Tersedianya dana dari lembaga litbang partnership 6. Peraturan Perundangan Yang Sering Berubah-ubah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada kebijakan satu pintu mengenai kegiatan litbang, masih tersebar di OPD. 2. Belum dikembangkan data base hasil penelitian dan pengembangan di lembaga litbang. 3. Hasil - hasil litbang belum mendapat perhatian dan dukungan dari para pihak. 4. Terbatasnya jumlah peneliti dan bidang kepakarannya yang menunjang dengan kebutuhan program strategis pemerintahan provinsi. 5. Terbatasnya prasarana dan sarana penunjang penelitian (laboratorium, database litbang, perpustakaan, dan lain-lain).



Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal (kewenangan PD)	Eksternal (diluar kewenangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			8. Belum adanya rencana induk kelitbangan. 9. Belum dijadikannya rekomendasi hasil kelitbangan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. 10. Kuantitas SDM Peneliti belum optimal 11. Lemahnya jejaring kerja	7. Adanya rekomendasi peneltian yang dilakukan opd lain 8. Persaingan di Era Globalisasi 9. Persepsi stakeholders yang kurang responsif 10. Dampak bertambahnya jumlah penduduk, sosial ekonomi, lingkungan, air bersih, listrik dan ASN dari luar daerah	6. Belum optimalnya koordinasi dengan kab/kota terkait dengan fungsi litbang yang disebabkan belum terbentuknya lembaga litbang di beberapa kab/kota di Kaltim. 7. Belum tersusunnya Grand Design dan road map penelitian dan pengembangan di daerah.

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal (kewenangan PD)	Eksternal (diluar kewenangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>12. Belum dikembangkan data base hasil penelitian terintegrasi dan pengembangan di lembaga litbang.</p> <p>13. Belum optimalnya koordinasi dengan kab/kota terkait dengan fungsi litbang yang disebabkan belum terbentuknya lembaga litbang di beberapa kab/kota di Kaltim</p> <p>14. Belum adanya database peneliti.</p> <p>15. Tidak adanya respon dari opd teknis terkait dalam pengajuan penelitian</p>		



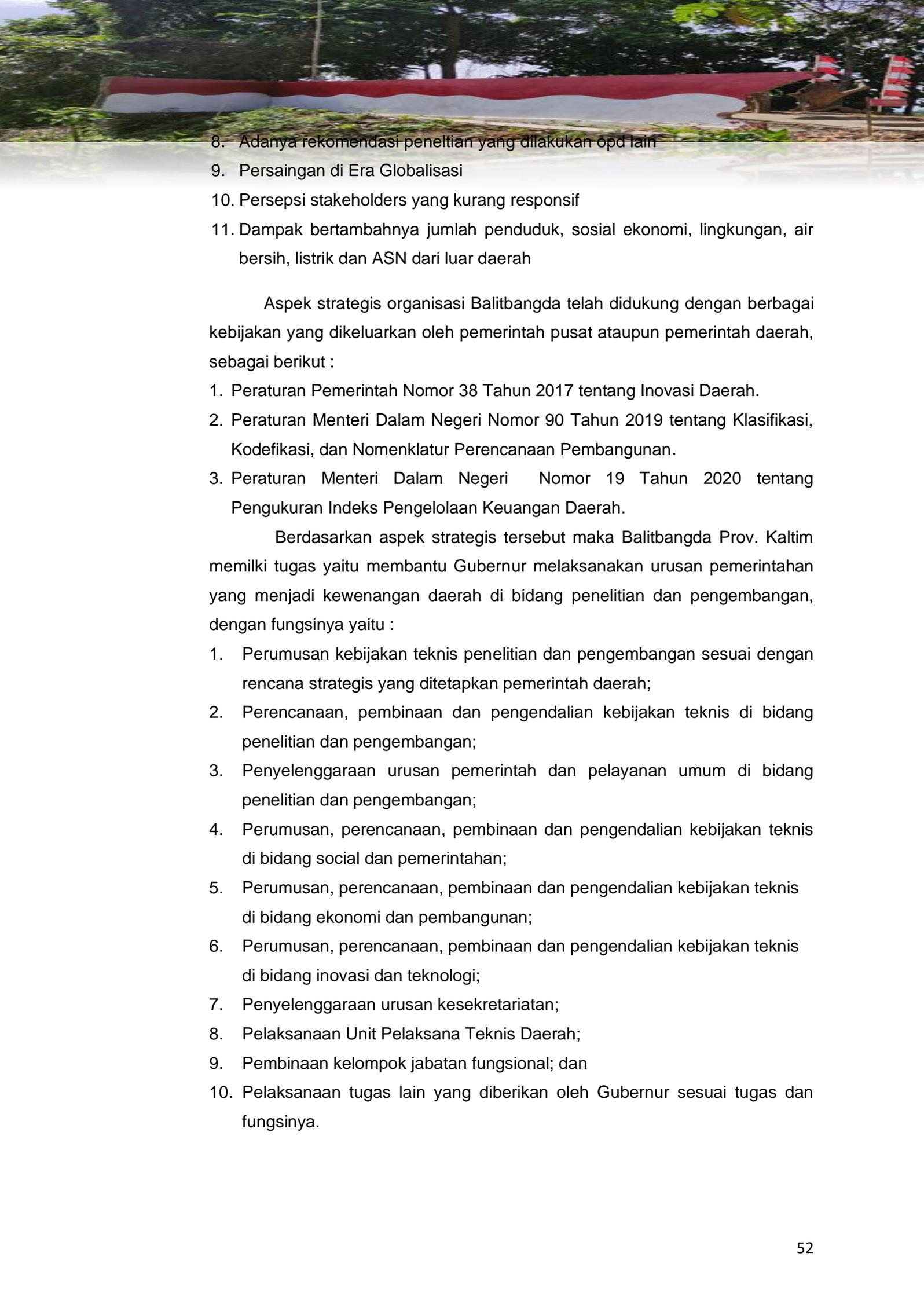
Ditinjau dari permasalahan tersebut maka permasalahan yang terkait dengan pelayanan litbang dan faktor-faktor yang mempengaruhi yang dapat diidentifikasi berdasarkan analisis gambaran pelayanan litbang secara internal dan eksternal dapat dijabarkan sebagaimana

Faktor internal yang mempengaruhi isu-isu strategis atau permasalahan tersebut yaitu :

1. Komitmen Kepala Daerah Sangat Kuat
2. Kedudukan Balitbangda Sangat Strategis
3. Komitmen Pimpinan Kuat
4. Kualitas SDM Peneliti
5. Belum Optimalnya Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Kegiatan Litbang
6. Belum adanya perda penelitian satu pintu
7. Terbatasnya prasarana dan sarana penunjang penelitian (lahan, laboratorium, database litbang).
8. Belum adanya rencana induk kelitbangan.
9. Belum dijadikannya rekomendasi hasil kelitbangan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
10. Kuantitas SDM Peneliti belum optimal
11. Lemahnya jejaring kerja
12. Belum dikembangkan data base hasil penelitian terintegrasi dan pengembangan di lembaga litbang.
13. Belum optimalnya koordinasi dengan kab/kota terkait dengan fungsi litbang yang disebabkan belum terbentuknya lembaga litbang di beberapa kab/kota di Kaltim
14. Belum adanya database peneliti.
15. Tidak adanya respon dari opd teknis terkait dalam pengajuan penelitian

Faktor eksternal yang mempengaruhi isu-isu strategis atau permasalahan tersebut yaitu :

1. Adanya pemindahan IKN ke Kaltim
2. Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Tersedianya SDM Peneliti di Luar Balitbangda
4. Adanya peraturan tentang SIDa
5. Adanya asosiasi peneliti di kaltim
6. Tersedianya dana dari lembaga litbang partnership
7. Peraturan Perundangan Yang Sering Berubah-ubah

- 
8. Adanya rekomendasi penelitian yang dilakukan opd lain
 9. Persaingan di Era Globalisasi
 10. Persepsi stakeholders yang kurang responsif
 11. Dampak bertambahnya jumlah penduduk, sosial ekonomi, lingkungan, air bersih, listrik dan ASN dari luar daerah

Aspek strategis organisasi Balitbangda telah didukung dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan aspek strategis tersebut maka Balitbangda Prov. Kaltim memiliki tugas yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penelitian dan pengembangan, dengan fungsinya yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang penelitian dan pengembangan;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang social dan pemerintahan;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang ekonomi dan pembangunan;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang inovasi dan teknologi;
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

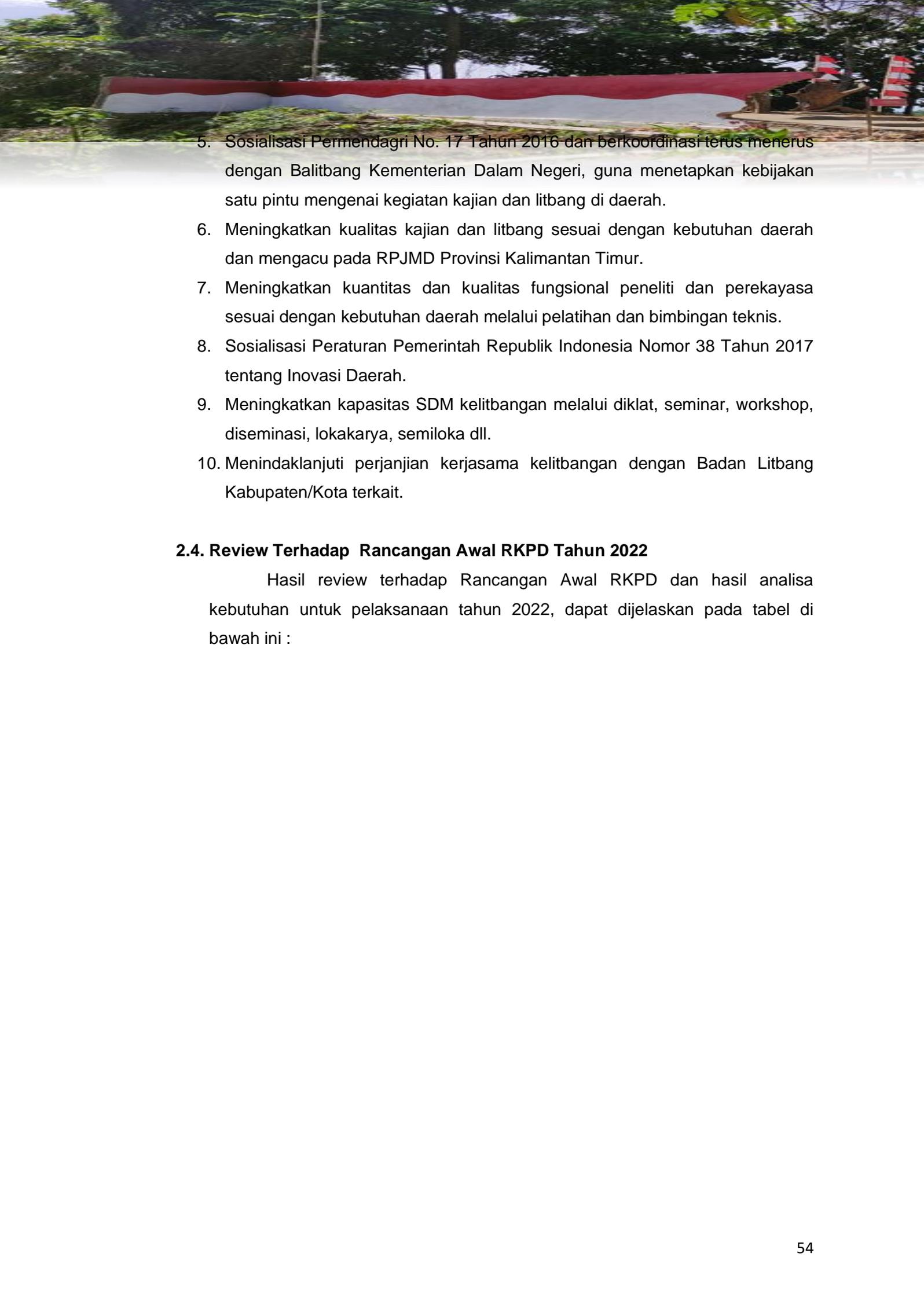


Permasalahan secara umum dan solusi terkait dengan kelitbang (kesekretariatan, litbang bidang sosial dan pemerintahan, litbang bidang ekonomi dan pembangunan, litbang bidang inovasi dan teknologi, litbang bidang ekonomi dan pembangunan, laboratorium konstruksi). Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan kelitbang yaitu :

1. Program kegiatan litbang yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang-bidang masih terfokus pada 2 (dua) kegiatan kelitbang utama yakni kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan belum masuk ke ranah perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan sehingga pengukuran capaian kinerja bidang masih belum optimal.
2. Belum ada kebijakan satu pintu mengenai kegiatan litbang dan masih tersebar di perangkat daerah.
3. Hasil-hasil kajian litbang belum mendapat perhatian dan dukungan sepenuhnya oleh user.
4. Jumlah peneliti yang kurang menunjang dengan kebutuhan program strategis Pemerintah Daerah
5. Belum maksimalnya jejaring kerja antar instansi kelitbang di Kab./Kota di Kaltim, karena baru ada 3 instansi litbang di kab/kota yaitu Balitbangda Kab. Kukar, Balitbangda Kab. Kutim dan Balitbangda Kota Samarinda sedangkan kab/kota lainnya fungsi litbang masih melekat di Bappeda/Badan Diklat.
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan jasa laboratorium pengujian bidang konstruksi terutama peralatan yang sudah tua dan gedung laboratorium yang tidak memenuhi syarat.
7. Terbatasnya anggaran kelitbang yang menghambat penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah.

Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Menghasilkan Penelitian yang Berkualitas dan Dapat Dipertanggungjawabkan.
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Daerah.
3. Mewujudkan Konektivitas Pembangunan Antar Daerah Kabupaten / Kota.
4. Memberikan Informasi dan Data Akurat Berdasarkan Hasil Penelitian Mengoptimalkan Sumber Daya untuk Peningkatan Kelitbang.

- 
5. Sosialisasi Permendagri No. 17 Tahun 2016 dan berkoordinasi terus menerus dengan Balitbang Kementerian Dalam Negeri, guna menetapkan kebijakan satu pintu mengenai kegiatan kajian dan litbang di daerah.
 6. Meningkatkan kualitas kajian dan litbang sesuai dengan kebutuhan daerah dan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.
 7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas fungsional peneliti dan perekayasa sesuai dengan kebutuhan daerah melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
 8. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
 9. Meningkatkan kapasitas SDM kelitbangan melalui diklat, seminar, workshop, diseminasi, lokakarya, semiloka dll.
 10. Menindaklanjuti perjanjian kerjasama kelitbangan dengan Badan Litbang Kabupaten/Kota terkait.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2022, dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4.1
Review terhadap RKPD Tahun 2022

Perangkat Daerah : Balitbangda Prov. Kaltim

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Kaltim	Persentase Hasil Penelitan yang disampaikan ke Perangkat Daerah	100%	1.500.000.000					13.332.811.500	
1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Kaltim	Persentase Hasil Penelitan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%	340.400.000	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Kaltim	Persentase Hasil Penelitan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%	1.285.000.000	
2	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Kaltim	Prosentase Hasil Penelitan dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100%	159.600.000	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Kaltim	Prosentase Hasil Penelitan dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100%	435.553.500	
3	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Kaltim	Persentase Hasil Penelitan dan Pengembangan Ekonomi dan Permbangunan	100%	500.000.000	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan	Dalam dan Luar Wilayah Provinsi	Persentase Hasil Penelitan dan Pengembangan Ekonomi dan Permbangunan	100%	8.500.000.000	

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Pembangunan	Kaltim				
4	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Kaltim	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100%	500.000.000	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Kaltim	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100%	3.112.258.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%							
6	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah dokumen perencanaan dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang direalisasikan tepat waktu	31 dokumen	42.800.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah dokumen perencanaan dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang direalisasikan tepat waktu	31 dokumen	94.740.000	

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.	Administrasi Keuangan	Samarinda	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	14 dokumen	12.121.189.430	Administrasi Keuangan	Samarinda	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	14 dokumen	13.245.909.158	
8	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	10 dokumen		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	10 dokumen	42.000.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	23.500 buah yang dicetak, 26.000 buah digandakan, 1 jenis komponen listrik, 20 Unit perlengkapan, 10 Jenis perlengkapan rumah tangga, 912 laporan perjalanan dinas	2,462,249,429	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	23.500 buah yang dicetak, 26.000 buah digandakan, 1 jenis komponen listrik, 20 Unit perlengkapan, 10 Jenis perlengkapan rumah tangga, 912 laporan perjalanan dinas	2.986.281.150	

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	25 unit peralatan kantor, 25 unit perlengkapan kantor, 50 unit mebeulair		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	30 unit peralatan kantor, 30 unit perlengkapan kantor, 60 unit mebeulair	372.543.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	jumlah jasa penunjang yang disediakan	100 surat, 27 layanan, 2.280 Mbps internet, 1.320 M3 air, 86.400 Kwh listrik	2.416.737.041	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	jumlah jasa penunjang yang disediakan	120 surat, 29 layanan, 2.736 Mbps internet, 1.584 M3 air, 103.400 Kwh listrik	1.864.699.598	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	jumlah barang milik daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 unit mobil jabatan, 27 unit kendaraan operasional, 2 unit Gedung, 120 unit peralatan, 27 unit perlatan mesin lainnya	457,024,100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	jumlah barang milik daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 unit mobil jabatan, 27 unit kendaraan operasional, 2 unit Gedung, 120 unit peralatan, 27 unit perlatan mesin lainnya	421.365.600	
	Jumlah				19.000.000.000					32.360.350.006	



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2022 diakomodir dalam Rakorda Kelitbangan Tahun 2021. Dalam hasil Rakorda tersebut disebutkan bahwa roadmap Rencana Induk Kelitbangan akan diusulkan untuk dibahas dalam kegiatan Rakor Rinduk Kelitbangan Tahun 2022 (terlampir).



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Gubernur Kalimantan Timur mengusung visi **“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”**. Adapun pelaksanaannya harus memerhatikan kesinambungan Visi RPJMD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur agar sejalan dengan rumusan dan tahapan pelaksanaan rencana pembangunan selama periode lima tahun kepemimpinan.

Untuk mewujudkan visi maka diperlukan serangkaian misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan melihat fokus dan peta permasalahan dan isu strategis serta amanat misi dalam RPJPD dan RPJMN maka arahan misi pembangunan 2019-2023 adalah:

1. Berdaulat Dalam Pembangunan SDA Yang Berahlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkedaulatan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan SDA yang berkedaulatan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Kebijakan perekonomian daerah sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah perlu didukung dengan pola penggunaan anggaran pembangunan. Dengan kata lain diperlukan optimalisasi penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dapat dijadikan dasar penentuan penyusunan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya review kembali terhadap program dan kegiatan pembangunan daerah apakah masih layak untuk dilaksanakan, apakah perlu penambahan program dan kegiatan, ataukah perlu juga penghapusan untuk mengoptimalkan pembangunan daerah.

Untuk mencapai sasaran RPJPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005-2025, maka dalam dokumen perencanaan harus disusun arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur.

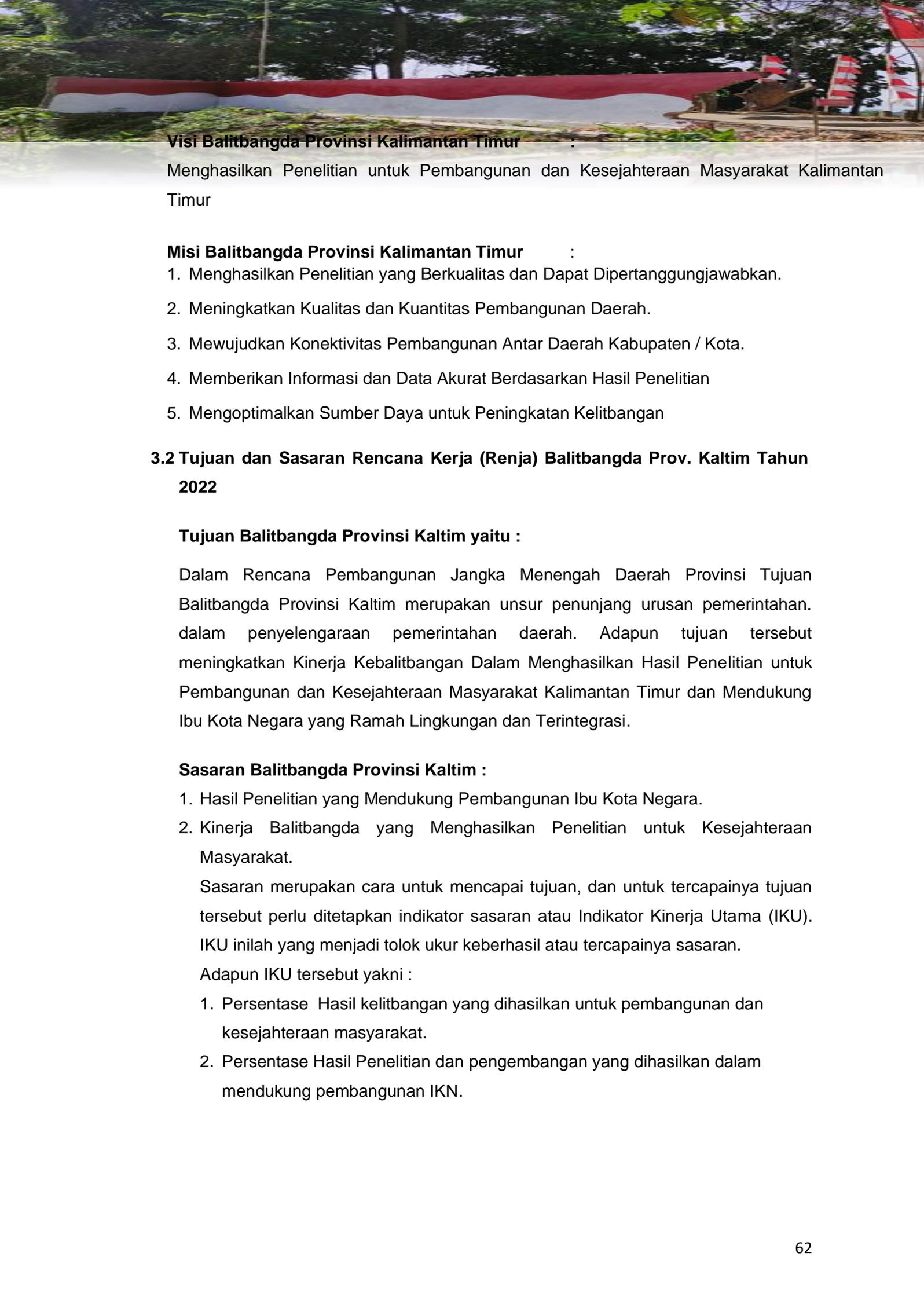


Sebagaimana tampak pada gambar tersebut, arah kebijakan Provinsi Kalimantan Timur pada RPJMD periode keempat (2019-2023), meliputi :

1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
2. Peningkatan Kualitas SDM
3. Pemantapan Struktur Ekonomi
4. Peningkatan Pelayanan Dasar
5. Efisiensi dan efektivitas, pemerintahan yang berbasis penegakan hukum
6. Konsistensi Penataan Ruang Wilayah Berbasis Ekonomi dan Ekologi
7. Menjaga Kualitas Lingkungan

Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur sebagai Perangkat Daerah (PD) pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan mempedomani sasaran ke 26, misi ke 5 dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang berbunyi : **“Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien”**, sehingga guna mendukung tercapainya sasaran tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menetapkan tujuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

“Meningkatkan Kinerja Kelitbangan Dalam Menghasilkan Hasil Penelitian untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Timur Serta Mendukung Ibu Kota Negara yang Ramah Lingkungan dan Terintegrasi”.



Visi Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur :

Menghasilkan Penelitian untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Timur

Misi Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur :

1. Menghasilkan Penelitian yang Berkualitas dan Dapat Dipertanggungjawabkan.
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Daerah.
3. Mewujudkan Konektivitas Pembangunan Antar Daerah Kabupaten / Kota.
4. Memberikan Informasi dan Data Akurat Berdasarkan Hasil Penelitian
5. Mengoptimalkan Sumber Daya untuk Peningkatan Kelitbangan

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2022

Tujuan Balitbangda Provinsi Kaltim yaitu :

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Tujuan Balitbangda Provinsi Kaltim merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan. dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun tujuan tersebut meningkatkan Kinerja Kealitbangan Dalam Menghasilkan Hasil Penelitian untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Timur dan Mendukung Ibu Kota Negara yang Ramah Lingkungan dan Terintegrasi.

Sasaran Balitbangda Provinsi Kaltim :

1. Hasil Penelitian yang Mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara.
2. Kinerja Balitbangda yang Menghasilkan Penelitian untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Sasaran merupakan cara untuk mencapai tujuan, dan untuk tercapainya tujuan tersebut perlu ditetapkan indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU inilah yang menjadi tolok ukur keberhasilan atau tercapainya sasaran.

Adapun IKU tersebut yakni :

1. Persentase Hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Persentase Hasil Penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dalam mendukung pembangunan IKN.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2022

Program dan kegiatan Renja Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan, dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tabel 3.31
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2022

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Judul Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penghargaan Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Kepada Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Kaltim	Bidang Sosial dan Pemerintahan
			Penilaian PD Terbaik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021	
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Master Plan Aplikasi IT dalam Mendukung IKN	
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	IPKD dan IKKD	
	Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kajian Pendidikan Anak Usia Dini dan Disabilitas di Provinsi Kaltim	Bidang Sosian dan Pemerintahan
		Penelitian dan Pengembangan	Kajian Situs Kerajaan Kutai Ing	

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Judul Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
		Pendidikan dan Kebudayaan	Martadipura	
	Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Master Plan Food Estate Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Di Provinsi Kaltim	Bidang Ekonomi dan Pembangunan
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Master Plan Peta Jalan Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Di Provinsi Kaltim	
		Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Kajian Rencana Induk Kelitbangan	
	Pengembangan inovasi dan teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kajian mengenai pembangunan kawasan pariwisata bahari di kepulauan derawan dan biduk-biduk	Bidang Inovasi dan Teknologi
			Master plan air bersih dalam mendukung Ibu Kota Negara	
			Kajian mengenai Pembangunan Iradiator di Kawasan Industri Buluminung di Kabupaten Penajam Paser Utara	
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Rakorda Kelitbangan	
			Diseminasi Kelitbangan	
			Jurnal Kelitbangan	
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Fasilitasi HAKI	

Dalam menentukan judul sub kegiatan melalui beberapa proses atau tahapan yakni : sinkronisasi program dan kegiatan pada Rakorda Kelitbangan, evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang kesemuanya berada di bawah arahan Kepala Badan. Kajian dilaksanakan secara tim yang beranggotakan para tenaga pendamping dari perguruan tinggi negeri/swasta yang telah menjalin kerjasama dengan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur.

Secara garis besar Rumusan dan Rekapitulasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, serta Penjelasan Pendanaan dan Kesesuaian dengan RKPD Tahun 2022 tampak pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun .2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Penunjang								
	Bidang Penelitian dan Pengembangan								
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian yang disampaikan ke Perangkat Daerah	Kab./Kota & Prov. Kaltim	100%	1.500.000.000	APBD		100%	
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab./Kota & Prov. Kaltim	100%	79.800.000	APBD		100%	1.610.000.000
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian	Kab./Kota & Prov. Kaltim	1 laporan	40.850.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun .2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah							
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kab./Kota & Prov. Kaltim	1 laporan	69.250.000	APBD			
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kab./Kota & Prov. Kaltim	1 laporan	79.800.000	APBD			
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Kab./Kota & Prov. Kaltim	2 laporan	70.700.000	APBD			
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian	Kab./Kota & Prov. Kaltim	1 laporan	79.800.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun .2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi							
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kab./Kota & Prov. Kaltim	100%	159.600.000	APBD		100%	535.553.500
	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab./Kota & Prov. Kaltim	1 laporan	79.800.000	APBD			
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah laporan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kab./Kota & Prov. Kaltim	1 laporan	79.800.000	APBD			
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan	Kab./Kota & Prov. Kaltim	100%	500.000.000	APBD		100%	8.775.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan	Kab./Kota & Prov. Kaltim	1 laporan	170.006.300	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun .2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	dan Menengah	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kab./Kota & Prov. Kaltim	1 laporan	165.070.000	APBD			
	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Kab./Kota & Prov. Kaltim	1 laporan	164.923.700	APBD			
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab./Kota & Prov. Kaltim	100%	500.000.000	APBD		100%	207.022.709.600
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Laporan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Inovasi dan Teknologi	Kab./Kota & Prov. Kaltim	3 laporan	500.000.000	APBD			
	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbanga	Rakor Kelitbagan	Kab./Kota & Prov. Kaltim	1 laporan	177.258.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun .2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	Samarinda	90%		APBD		95%	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang direalisasikan tepat waktu	Samarinda	11 dokumen	42.800.000	APBD		11 dokumen	113.688.000
	Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Samarinda	14 dokumen	12.121.189.430	APBD		14 dokumen	15.895.090.990
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu				APBD			50.400.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	Samarinda	23.500 buah yang dicetak, 26.000 buah digandakan, 10 jenis komponen	2.462.249.429	APBD			3.583.537.380

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun .2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				listrik, 1313 laporan perjalanan dinas					
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang milik daerah yang diadakan				APBD			447.051.600
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Samarinda	120 surat, 29 layanan, 2.736 Mbps internet, 1.584 M3 air, 103.400 Kwh listrik	2.416.737.041	APBD			2.014.406.144
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Samarinda	30 unit	457.024.100	APBD			505.638.720
					19.000.000.000				240.553.075.934

Progress Pelaksanaan Pembangunan Science Center Kalimantan Timur/ Innovative Science and Research Area Network (ISRAN)

no	Uraian	Keterangan
1.	Studi Kelayakan Pembangunan Science Center Kalimantan Timur/ Innovative Science and Research Area Network (ISRAN)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Studi Kelayakan 	sedang dilaksanakan konsultan
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Tim Pendukung Studi Kelayakan 	dalam proses
2.	Penyiapan areal ISRAN	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembersihan awal areal batas 	telah dilaksanakan
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemasangan patok dan tali batas 	telah dilaksanakan
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur dasar 	sedang dilaksanakan
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan bibit pohon endemik Kaltim 	telah dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Prov. Kaltim
	<ul style="list-style-type: none"> • Groundbreaking pembangunan 	groundbreaking oleh Gubernur Kaltim
3.	Proses Administrasi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi 	telah terbit
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian proposal Pembangunan Science Center Kalimantan Timur/ Innovative Science and Research Area Network (ISRAN) 	telah dilaksanakan kepada PP IPtek, BPP Kemendagri, BRIN dan pihak terkait lainnya

Dokumentasi *groundbreaking* pembangunan the Mountain of Innovation Science and Research Area Network (ISRAN), 14 Juli 2021.





BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022 telah disesuaikan dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan telah disesuaikan dengan RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2022, terdiri dari 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan.

Pendanaan kelitbangan dialokasikan sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan sekretariat sebesar Rp. 17.500.000.000,-. Total pendanaan Rp. 19.000.000.000,-. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tersebut kemudian disesuaikan dengan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 yang telah ditetapkan, yang terlampir pada tabel berikut :

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2022**

Kod	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	
Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah									
Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah									
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN								
5	5			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			19.000.000.000	25.942.302.197	
5	5	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pelayanan publik pada tugas Balitbangda	97%	17.500.000.000	22.071.748.697
5	05	001	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Meningkatnya Dokumen perencanaan dan anggaran yang mendukung nilai akuntabilitas kinerja PD	100 Persen	42.800.000	113.688.000
5	5	1	1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota,	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 Dokumen	12.550.000	64.152.000
5	5	1	1.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	21 Laporan	30.250.000	49.536.000
5	05	001	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	12.121.189.430	15.895.090.990
5	5	1	1.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota,	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	13 Dokumen	12.121.189.430	15.895.090.990
5	05	001	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja ASN	100 Persen	2.462.249.429	3.535.876.843
5	5	1	1.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kabupaten/Kota,	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang diadakan	12Jenis	109.519.220	57.599.892
5	5	1	1.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kabupaten/Kota,	Jumlah dokumen penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 Dokumen	174.730.209	90.000.000
5	5	1	1.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	12 Laporan	2.178.000.000	3.388.276.951
5	05	001	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah		Persentase Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Balitbangda Prov. Kaltim	100 Persen	2.416.737.041	2.014.406.144
5	5	1	1.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota,	Jumlah surat menyurat yang dilaksanakan	100 Surat	10.000.000	10.800.000
5	5	1	1.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/Kota, Semua	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik	12 Laporan	240.496.105	440.972.532
5	5	1	1.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kabupaten/Kota,	Jumlah dokumen daftar gaji non pns	13 Dokumen	2.166.240.936	1.562.633.612

5	05	001	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Meningkatnya Pelayanan Kedinasan	100 Persen	457.024.100	512.686.720
5	5	1	1.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Semua Kabupaten/Kota, Semua	Jumlah pemeliharaan dan pajak Kendaraan Dinas/Operasional	27 Unit	131.064.100	127.224.000
5	5	1	1.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	50 Unit	64.960.000	63.000.000
5	5	1	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua	Jumlah luasan pemeliharaan gedung kantor	2 Unit	170.000.000	222.462.720
5	5	1	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Luas areal yang dilakukan pemeliharaan	7000m2	91.000.000	100.000.000
5	5	2		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase hasil penelitian yang disampaikan ke Perangkat Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)	90%	1.500.000.000	3.870.553.500
5	05	002	1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase Rekomendasi yang dihasilkan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 Persen	340.400.000	1.335.000.000
5	5	2	1.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	79.800.000	235.000.000
5	5	2	1.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua	Jumlah Laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	40.850.000	275.000.000
5	5	2	1.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan, Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	69.250.000	-
5	5	2	1.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	79.800.000	550.000.000
5	5	2	1.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	2 Laporan	70.700.000	275.000.000
5	05	002	1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase Rekomendasi yang dihasilkan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100 Persen	159.600.000	535.553.500

5	5	2	1.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Semua Kabupaten/Kota, Semua	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Laporan	79.800.000	167.000.000
5	5	2	1.02	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Laporan	79.800.000	368.553.500
5	05	002	1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Rekomendasi yang dihasilkan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100 Persen	500.000.000	1.500.000.000
5	5	2	1.03	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kab. Berau, Semua Kecamatan	Laporan laporan penelitian dab pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	1 Laporan	170.006.300	500.000.000
					Kab. Kutai Kartanegara, Semua				
					Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,				
					Kab. Kutai Timur, Semua				
					Kab. Paser, Semua				
					Kota Balikpapan, Semua				
					Kota Bontang, Semua				
					Kota Samarinda, Semua				
					Kab. Penajam Paser Utara, Semua				
					kab. Tenggarong, Semua Kecamatan,				
					Kab. Mahakam Ulu, Semua				
5	5	2	1.03	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua	Laporan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Laporan	165.070.000	500.000.000
5	5	2	1.03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Kab. Berau, Semua Kecamatan	Laporan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1 Laporan	164.923.700	500.000.000
					Kab. Kutai Kartanegara, Semua				
					Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,				
					Kab. Kutai Timur, Semua				
					Kab. Paser, Semua				
					Kota Balikpapan, Semua				
					Kota Bontang, Semua				

					Kota Samarinda, Semua Kecamatan,				
					Kab. Penajam Paser Utara, Semua				
					kab. Tenggarong, Semua				
					Kab. Mahakam Ulu, Semua				
5	05	002	1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase Rekomendasi yang dihasilkan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100 Persen	500.000.000	500.000.000
5	5	2	1.04	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Berau, Pulau Derawan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penelitian, pengembangan dan perekayasaan di Bidang Inovasi dan Teknologi	3 Laporan	500.000.000	500.000.000
					Kab. Berau, Biduk- Biduk, Semua				
					Kab. Kutai Kartanegara,				
					Kota Balikpapan, Semua				
					Kab. Penajam Paser Utara,				



BAB V PENUTUP

Bahwa Rencana Kerja (Renja) Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 merupakan rencana pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Renja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dibuat dengan mempedomani peraturan perundangan dan isu-isu aktual serta telah mengakomodir penugasan terbaru kepada Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Tahun 2022 ini diakomodir oleh tiga bidang yakni sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi. Hasil kajian dari sub kegiatan tersebut disampaikan dalam bentuk rekomendasi disampaikan ke pemerintah daerah selaku pengambil kebijakan, yang sejatinya dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

Melalui Renja Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2022 ini, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan serta untuk terwujudkannya sinergitas semua pihak yang terkait dengan kelitbangan, sehingga ke depannya dapat terwujud kelitbangan satu pintu.

Demikian laporan Renja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, mudah-mudahan laporan ini dapat dijadikan acuan dan pertimbangan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

